

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DALAM MENGATASI KESENJANGAN
AKSES PENDIDIKAN DI KABUPATEN PESISIR BARAT PROVINSI
LAMPUNG**

Oleh

APRI CAHYATI LESTARI

2416041104

Reguler C



**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG**

2025

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan salah satu acuan penting dalam menyusun kerangka penelitian, karena dapat memberikan gambaran mengenai topik yang sudah pernah diteliti sebelumnya serta menunjukkan posisi penelitian yang sedang dilakukan. Kajian terhadap penelitian terdahulu juga berfungsi untuk mengidentifikasi kesamaan maupun perbedaan yang dapat dijadikan landasan dalam mengembangkan penelitian baru. Pada bagian ini disajikan beberapa penelitian relevan yang membahas implementasi kebijakan pendidikan serta kesenjangan akses pendidikan, baik di tingkat nasional maupun daerah. Ringkasan hasil penelitian terdahulu tersebut ditampilkan dalam tabel berikut, dengan fokus pada judul, temuan hasil, serta perbedaan penelitian dengan skripsi ini.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Judul	Hasil	Perbedaan Penelitian
1.	Nasaruddin (2023), Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan Dasar di Kabupaten Sinjai.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai No. 13 Tahun 2014 memberikan dampak positif terhadap penyelenggaraan pendidikan, baik dari infrastruktur maupun non-infrastruktur. Meski demikian, masih terdapat sejumlah kendala yang dipengaruhi oleh faktor geografis, ekonomi, serta partisipasi masyarakat. Penelitian ini juga merekomendasikan model	Penelitian Nasaruddin mengkaji implementasi kebijakan pendidikan dan menyoroti faktor penghambat maupun pendukung dalam penyelenggaraan pendidikan. Namun, berfokus pada Kabupaten Sinjai dan menekankan rekomendasi model <i>boarding school</i> , sedangkan penelitian ini menyoroti implementasi kebijakan pendidikan untuk mengatasi kesenjangan

		baru berupa sekolah berasrama (<i>boarding school</i>) sebagai solusi pemerataan akses.	akses di daerah 3T, khususnya Kabupaten Pesisir Barat Lampung.
2.	Duwi Meilina (2016), Implementasi Kebijakan Pendidikan Program Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) di SMAN 1 Kasui Way Kanan.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan BOSDA di Way Kanan berjalan sesuai prosedur melalui struktur organisasi yang jelas, mekanisme pelaksanaan yang mengacu pada juklak/juknis, serta adanya sistem monitoring berkala. Program BOSDA terbukti meningkatkan angka partisipasi sekolah, mutu lulusan, dan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan. Namun, terdapat hambatan berupa keterlambatan pencairan dana, ketidakdisiplinan administrasi, dan lemahnya konsistensi monitoring.	penelitian Meilina membahas kebijakan pendidikan yang fokus pada program BOSDA di tingkat sekolah menengah di Kabupaten Way Kanan, sementara penelitian ini berfokus pada implementasi kebijakan pemerataan akses pendidikan di daerah 3T, khususnya Kabupaten Pesisir Barat Lampung, dengan lingkup masalah yang lebih luas dari sekadar program bantuan dana.
3.	Wijayati, I. W., Danamik, F. H. S., & Prawirosastro, C. L. (2025), Kesenjangan Akses Pendidikan di Daerah Terpencil: Analisis Kebijakan dan Alternatif Solusi.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesenjangan akses pendidikan di daerah terpencil masih sangat dipengaruhi keterbatasan infrastruktur fisik maupun digital, ketidaksesuaian kebijakan, kurangnya guru terlatih, serta lemahnya koordinasi antar pemangku kepentingan. Pandemi COVID-19 memperparah kesenjangan digital sehingga anak-anak di daerah terpencil kesulitan mengikuti pembelajaran jarak jauh. Artikel ini	Penelitian oleh Wijayati, dkk. membahas kesenjangan akses pendidikan di daerah terpencil serta menyoroti peran kebijakan dan faktor penghambatnya. Namun, penelitian ini membahas secara umum di tingkat nasional dan lebih banyak memberi saran atau solusi, sedangkan penelitian ini fokus pada kasus nyata di Kabupaten Pesisir Barat Lampung dengan

		menawarkan solusi alternatif berupa pendidikan berbasis komunitas, penggunaan teknologi pembelajaran offline, dan kemitraan publik-swasta. Penulis menekankan perlunya kerangka kebijakan yang inklusif, berkelanjutan, dan berbasis bukti, dengan kolaborasi erat antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta.	melihat langsung bagaimana kebijakan dijalankan di lapangan.
--	--	--	--

Beberapa penelitian sebelumnya memberikan gambaran terkait implementasi kebijakan pendidikan dalam mengatasi persoalan akses pendidikan. Penelitian yang dilakukan oleh Nasaruddin (2023) mengenai Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan Dasar di Kabupaten Sinjai menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan mampu memberikan dampak positif terhadap pembangunan infrastruktur maupun non-infrastruktur. Namun, penelitian tersebut juga menegaskan adanya hambatan berupa kondisi geografis, ekonomi masyarakat, serta partisipasi masyarakat. Relevansinya dengan penelitian ini terletak pada fokus yang sama dalam melihat implementasi kebijakan pendidikan beserta faktor penghambat dan pendukungnya, meskipun penelitian Nasaruddin lebih menekankan pada konteks Kabupaten Sinjai, sedangkan penelitian ini berfokus pada Kabupaten Pesisir Barat.

Selanjutnya, penelitian oleh Meilina (2016) mengenai Implementasi Kebijakan Pendidikan Program Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) di Kabupaten Way Kanan menemukan bahwa implementasi kebijakan BOSDA cukup berhasil meningkatkan partisipasi siswa, mutu lulusan, dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan. Namun demikian, terdapat kendala seperti keterlambatan pencairan dana, lemahnya konsistensi monitoring, serta masalah administrasi. Penelitian ini relevan dengan penelitian sekarang karena

sama-sama membahas implementasi kebijakan pendidikan, tetapi berbeda pada objek kajian. Jika penelitian Meilina menitikberatkan pada kebijakan BOSDA, penelitian ini lebih luas karena menelaah berbagai kebijakan yang terkait dengan pemerataan akses pendidikan di daerah 3T, khususnya Kabupaten Pesisir Barat.

Adapun penelitian yang dilakukan oleh Wijayati, et al. (2025) melalui artikel berjudul Kesenjangan Akses Pendidikan di Daerah Terpencil: Analisis Kebijakan dan Alternatif Solusi menegaskan bahwa kesenjangan akses pendidikan disebabkan oleh keterbatasan infrastruktur, minimnya guru, lemahnya kebijakan, serta faktor sosial ekonomi. Pandemi COVID-19 juga memperparah kesenjangan digital, membuat anak-anak di daerah terpencil semakin sulit mendapatkan pendidikan berkualitas. Artikel ini menawarkan solusi berupa pendidikan berbasis komunitas, pemanfaatan teknologi offline, serta kemitraan publik-swasta. Relevansinya dengan penelitian ini terletak pada fokus yang sama dalam menyoroti kesenjangan pendidikan di daerah terpencil, sedangkan perbedaannya adalah penelitian Wijayati bersifat kajian literatur dengan cakupan nasional, sementara penelitian ini bersifat empiris dengan fokus spesifik di Kabupaten Pesisir Barat Lampung.

2.2 Kajian Teori

Kajian teori merupakan bagian yang berisi penjelasan tentang konsep dan teori yang dipakai sebagai dasar penelitian. Teori-teori ini membantu memahami masalah, menjelaskan hubungan antar variabel, dan memberikan arah dalam menganalisis data. Dengan kajian teori penelitian memiliki kerangka yang jelas untuk menelaah bagaimana implementasi kebijakan berpengaruh terhadap kesenjangan akses pendidikan.

2.2.1 Kebijakan Publik

Kebijakan publik pada dasarnya adalah seperangkat keputusan yang disusun untuk mencapai tujuan tertentu dalam kehidupan bersama. Ia tidak hanya hadir

dalam bentuk aturan tertulis, melainkan juga berfungsi sebagai pedoman yang menjaga konsistensi arah pembangunan dan menjadi pegangan bagi semua pihak yang terlibat (Desrinelti, 2021). Karena sifatnya yang fundamental, kebijakan publik dipandang sebagai salah satu instrumen utama pemerintah untuk mengarahkan jalannya pembangunan agar selaras dengan kebutuhan masyarakat.

Tujuan dari kebijakan publik adalah menghadirkan solusi atas masalah-masalah yang berkembang di masyarakat. Namun, tidak semua persoalan otomatis masuk dalam agenda kebijakan. Hanya masalah yang dianggap penting, mendesak, dan mampu menggugah kepedulian publik yang biasanya akan direspons melalui kebijakan. Dengan demikian, perumusan masalah menjadi tahapan penting dalam proses kebijakan publik, karena dari sinilah arah dan fokus kebijakan ditentukan (Widodo, 2021).

Kebijakan publik juga dapat dipahami sebagai kerangka besar yang menaungi program dan proyek. Program merupakan turunan dari kebijakan yang lebih umum, sedangkan proyek adalah kegiatan yang lebih konkret dan terukur di lapangan. Misalnya, dalam kebijakan pendidikan terdapat program pemerataan akses pendidikan, yang kemudian diwujudkan melalui proyek pembangunan ruang kelas, pelatihan guru, atau penyediaan sarana belajar. Keterkaitan yang erat antara kebijakan, program, dan proyek menuntut koordinasi yang baik. Tanpa itu, kebijakan berpotensi gagal mencapai tujuan (Kristian, 2023).

Dalam perkembangannya, kajian tentang kebijakan publik tidak bisa dilepaskan dari berbagai model analisis. Model rasional menekankan pada pengambilan keputusan berbasis data dan analisis untung dan rugi untuk memilih alternatif terbaik. Sebaliknya, model inkremental melihat kebijakan sebagai hasil dari serangkaian kompromi politik yang bersifat bertahap. Sementara itu, model jaringan kebijakan (*policy network*) menekankan interaksi banyak aktor, termasuk pemerintah, masyarakat sipil, sektor swasta, hingga media, dalam proses perumusan dan implementasi kebijakan (Ramdhani & Ramdhani, 2017).

Pendekatan ini memperlihatkan bahwa kebijakan publik bukanlah produk birokrasi semata, melainkan hasil tarik-menarik kepentingan yang kompleks.

Keberhasilan kebijakan publik ditentukan oleh sejumlah faktor. Sumber daya yang memadai, baik dari aspek anggaran maupun kapasitas pelaksana, menjadi syarat utama. Selain itu, komunikasi yang efektif antar pihak terkait, struktur birokrasi yang jelas, serta komitmen dari para pelaksana juga memengaruhi keberhasilan kebijakan. Jika salah satu unsur ini lemah, maka implementasi kebijakan rawan menemui hambatan (Kristian, 2023). Oleh karena itu, evaluasi kebijakan harus dilakukan secara berkelanjutan, mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan, agar dampak yang dihasilkan tetap sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Dari uraian tersebut, dapat ditegaskan bahwa kebijakan publik merupakan kerangka strategis yang menyatukan visi, program, dan tindakan pemerintah dalam merespons masalah publik. Hal tersebut adalah proses dinamis yang melibatkan banyak aktor, membutuhkan koordinasi yang erat, serta menuntut evaluasi berkesinambungan agar tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat. Pemahaman teoritis ini penting sebagai pijakan awal untuk menilai bagaimana implementasi kebijakan mampu mengatasi persoalan kesenjangan akses pendidikan yang menjadi fokus penelitian.

2.2.2 Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan publik pada dasarnya merupakan tahap penting setelah kebijakan dirumuskan dan ditetapkan. Sebagus apa pun rancangan kebijakan, jika tidak diimplementasikan dengan baik, maka kebijakan tersebut tidak akan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Implementasi dapat dipahami sebagai serangkaian tindakan administratif maupun operasional yang dilakukan oleh aktor pelaksana untuk mencapai tujuan kebijakan. Dalam praktiknya, implementasi tidak hanya sekadar menjalankan aturan, tetapi juga menuntut adanya koordinasi, sumber daya, serta kesesuaian antara tujuan kebijakan dengan kondisi lapangan (Edward III, 1980 dalam Subarsono, 2016).

Menurut Teori Edward III, disposisi atau sikap pelaksana kebijakan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan suatu program. Karakteristik pribadi yang dimiliki para pelaksana akan menentukan sejauh mana kebijakan dapat dijalankan sesuai tujuan. Disposisi ini juga berkaitan erat dengan struktur birokrasi. Jika pembagian kewenangan dalam birokrasi jelas, maka komitmen pelaksana untuk mewujudkan tujuan kebijakan juga akan semakin kuat. Untuk itu, agar implementasi kebijakan berjalan efektif, Edward menekankan pentingnya memperhatikan empat hal pokok, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap pelaksana, serta struktur birokrasi (Nurwan, 2019).

Implementasi kebijakan publik seringkali menghadapi tantangan yang cukup kompleks. Faktor sumber daya manusia, anggaran, komunikasi antar-lembaga, hingga kondisi sosial masyarakat menjadi variabel penting yang dapat memengaruhi keberhasilan implementasi. Misalnya, meskipun kebijakan telah disusun dengan detail, kurangnya pemahaman dari pelaksana di lapangan dapat menghambat pencapaian tujuan. Selain itu, jika distribusi sumber daya tidak merata, pelaksanaan kebijakan bisa timpang dan hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan (Agustino, 2020).

Implementasi kebijakan dapat dipandang sebagai proses yang dinamis, di mana tujuan yang telah dirumuskan dalam tahap perencanaan diuji langsung dalam realitas sosial. Keberhasilan implementasi sangat dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah dalam menyesuaikan desain kebijakan dengan konteks lapangan. Artinya, implementasi yang efektif tidak hanya soal kepatuhan administratif, tetapi juga kemampuan adaptasi terhadap berbagai kendala praktis di masyarakat (Winarno, 2012).

2.2.3 Pendidikan dan Kebijakan Pendidikan

Akses pendidikan merupakan isu fundamental dalam kebijakan pembangunan, karena menjadi pintu utama bagi terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas. Kesempatan memperoleh pendidikan tidak boleh terhalang oleh faktor eksternal seperti jenis kelamin, kondisi ekonomi, lokasi geografis, maupun

latar belakang keluarga. Prinsip keadilan pembangunan menghendaki agar setiap anak, baik di kota maupun desa, mendapatkan peluang yang sama dalam mengakses pendidikan. Masyarakat sudah tidak lagi memandang gender sebagai penghalang utama di tingkat pendidikan dasar. Akan tetapi, hambatan lain tetap muncul, khususnya pada jenjang menengah, di mana faktor ekonomi keluarga, biaya pendidikan, hingga keterbatasan transportasi kerap menjadi alasan anak tidak melanjutkan sekolah (Ayuningtyas, 2021). Kondisi ini menegaskan pentingnya reformasi kebijakan pendidikan yang lebih responsif terhadap kesenjangan akses.

Akses pendidikan sendiri dapat dipahami sebagai jaminan kesempatan setara bagi setiap individu untuk mendapatkan layanan pendidikan tanpa diskriminasi. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menekankan pemerataan kesempatan sebagai strategi dalam menciptakan keadilan pendidikan. Pendidikan tidak hanya dipandang sebagai hak dasar, melainkan juga instrumen penting bagi pembangunan bangsa. Melalui pendidikan yang berkualitas, sumber daya manusia dapat dikembangkan untuk mendukung kemajuan sosial, ekonomi, maupun politik negara. Dengan demikian, pemerataan akses pendidikan merupakan bagian integral dari strategi pembangunan berkelanjutan di Indonesia (Suyana et al., 2024).

Persoalan pemerataan pendidikan mencakup dua dimensi: pertama, kesetaraan kesempatan untuk mengenyam pendidikan; kedua, keadilan dalam kualitas layanan pendidikan yang diterima. Meski angka partisipasi sekolah meningkat, perbedaan kualitas layanan pendidikan antara wilayah maju dan daerah terpencil masih terlihat jelas. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kesenjangan fasilitas, distribusi guru, serta keterbatasan infrastruktur memperparah ketidaksetaraan ini (Fatricia et al., 2023).

Peran negara dalam hal ini sangat penting, sebagaimana diamanatkan UUD 1945, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah melalui berbagai kebijakan seperti Bantuan Operasional

Sekolah (BOS), Program Indonesia Pintar (PIP), serta program wajib belajar berusaha menjawab kesenjangan akses pendidikan. Namun, kebijakan tersebut harus terus dievaluasi agar tidak hanya bersifat administratif, melainkan benar-benar menjangkau kelompok paling rentan: anak-anak dari keluarga miskin, masyarakat di daerah terpencil, serta kelompok penyandang disabilitas. Tanpa kebijakan yang inklusif dan adaptif, tujuan pemerataan pendidikan akan sulit tercapai secara utuh.

Dengan demikian, pendidikan dan kebijakan pendidikan saling terkait erat sebagai pilar pembangunan bangsa. Pendidikan merupakan sarana mencetak generasi berkualitas, sementara kebijakan berfungsi sebagai instrumen yang menjamin kesempatan setara bagi semua warga negara. Landasan teori ini menjadi penting untuk menganalisis bagaimana kebijakan publik di bidang pendidikan mampu, atau justru gagal, dalam mengatasi kesenjangan akses yang masih berlangsung hingga kini.

2.2.4 Kesenjangan Akses Pendidikan

Kesenjangan akses pendidikan merupakan persoalan krusial dalam pembangunan nasional. Secara normatif, konstitusi Indonesia melalui UUD 1945 menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan yang layak. Pendidikan dasar bahkan dipandang sebagai hak fundamental yang menjadi fondasi pembentukan karakter, pengembangan potensi, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Namun, dalam praktiknya, realitas di lapangan masih menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan dalam akses maupun kualitas pendidikan. Perbedaan tersebut terlihat jelas antara wilayah perkotaan dengan pedesaan, sekolah negeri dengan swasta, serta antara kelompok masyarakat dengan latar belakang ekonomi yang berbeda (Fatricia et al., 2025).

Kebijakan pendidikan yang dirancang pemerintah sering kali tidak sejalan dengan kesiapan sekolah untuk mengimplementasikannya. Kurangnya sosialisasi dan pemahaman atas kebijakan baru membuat sekolah kesulitan mengintegrasikan program ke dalam kegiatan belajar mengajar. Akibatnya, tujuan kebijakan yang

seharusnya menjamin persamaan hak dalam memperoleh pendidikan justru tidak tercapai sepenuhnya. Dalam beberapa kasus, implementasi kebijakan justru memperlebar kesenjangan, karena sekolah dengan sumber daya lebih baik mampu menyesuaikan diri dengan cepat, sedangkan sekolah dengan sumber daya terbatas tertinggal (Suyana et al., 2024).

Kesenjangan pendidikan tidak hanya mencakup aspek kuantitas seperti angka partisipasi sekolah, tetapi juga aspek kualitas layanan pendidikan. Di banyak daerah tertinggal, masalah distribusi guru, keterbatasan fasilitas, serta minimnya infrastruktur dasar seperti listrik dan akses internet, menjadi hambatan besar bagi anak-anak untuk mendapatkan layanan pendidikan setara dengan daerah maju. Studi terbaru menunjukkan bahwa faktor ekonomi keluarga juga berperan penting dalam memperlebar kesenjangan ini. Anak-anak dari keluarga kurang mampu lebih berisiko putus sekolah, sementara mereka yang mampu secara finansial dapat melanjutkan pendidikan hingga jenjang lebih tinggi (Noviani et al., 2025).

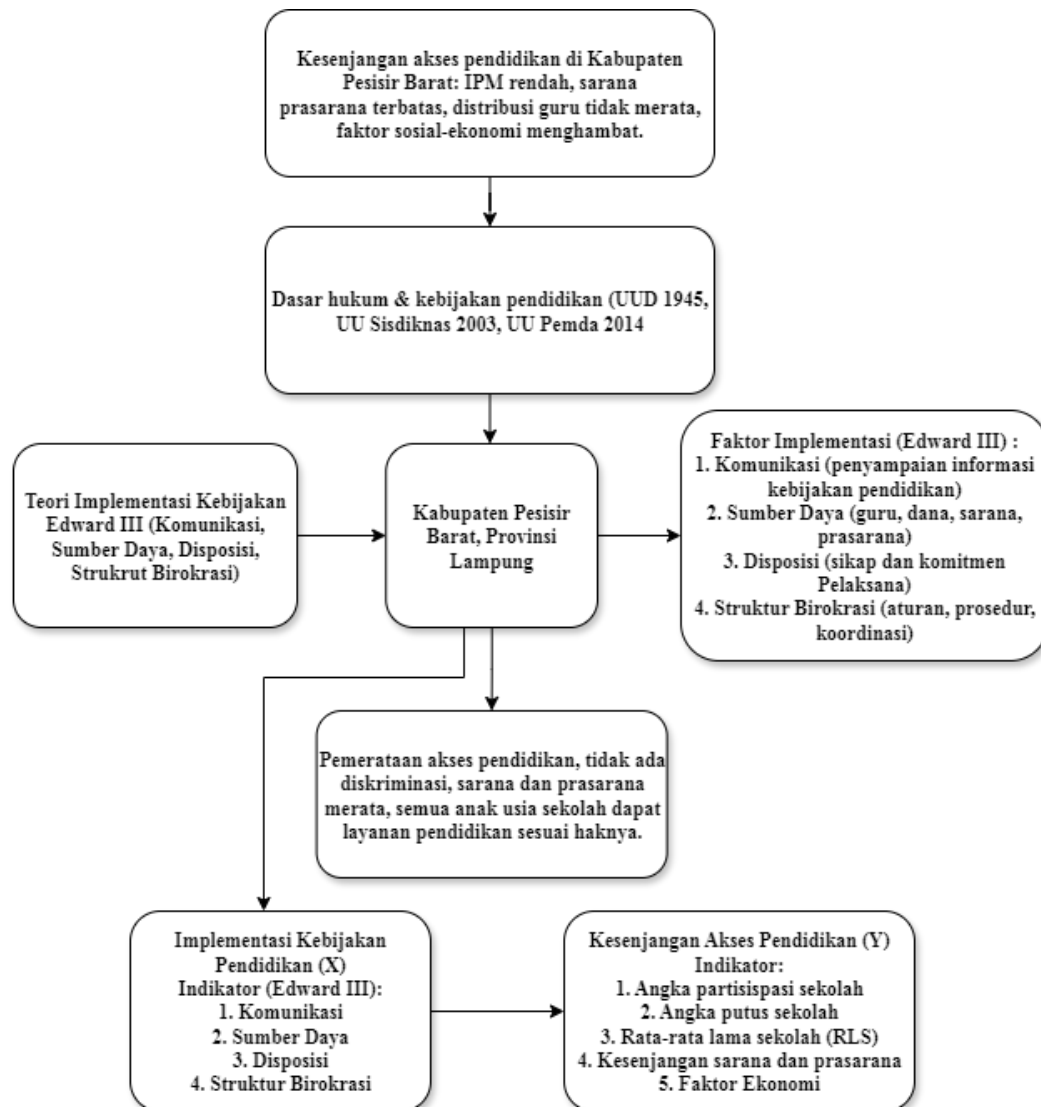
Selain faktor, dimensi sosial budaya turut memengaruhi kesenjangan akses pendidikan. Norma masyarakat, peran gender, dan ekspektasi keluarga sering kali menentukan keputusan apakah anak, terutama perempuan di daerah pedesaan, dapat melanjutkan sekolah. Pandangan bahwa pendidikan lanjutan tidak memberikan keuntungan praktis atau bahwa anak perempuan lebih baik segera menikah, menjadi hambatan non-ekonomi yang sulit diatasi dengan kebijakan administratif semata (Ayuningtyas, 2021).

Untuk mengatasi kesenjangan akses pendidikan, pemerintah perlu mengembangkan kebijakan yang bersifat kontekstual dan berbasis kebutuhan lokal. Kebijakan nasional seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS) atau Program Indonesia Pintar (PIP) harus disertai dengan evaluasi menyeluruh agar benar-benar menjangkau kelompok yang paling rentan. Selain itu, distribusi sumber daya untuk guru, fasilitas, maupun infrastruktur yang perlu dilakukan dengan prinsip keadilan, bukan sekadar keseragaman administratif. Hanya dengan

cara itu kesenjangan pendidikan dapat dikurangi, sehingga hak setiap anak atas pendidikan bermutu tanpa diskriminasi dapat terwujud.

2.3. Kerangka Pikir

Fenomena kesenjangan akses pendidikan di Kabupaten Pesisir Barat tampak dari rendahnya Indeks Pembangunan Manusia, keterbatasan sarana-prasarana, distribusi guru yang tidak merata, serta hambatan sosial-ekonomi. Kondisi ini menuntut implementasi kebijakan pendidikan yang efektif sesuai dasar hukum yang berlaku (UUD 1945, UU Sisdiknas 2003, UU Pemda 2014). Penelitian ini menggunakan Teori Implementasi Kebijakan Edward III, yang menekankan empat faktor utama: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Faktor-faktor tersebut (Variabel X) diduga memengaruhi kesenjangan akses pendidikan (Variabel Y) yang tercermin dari angka partisipasi sekolah, angka putus sekolah, rata-rata lama sekolah, ketersediaan sarana-prasarana, dan faktor ekonomi. Dengan lokus penelitian di Kabupaten Pesisir Barat, penelitian ini bertujuan menunjukkan bagaimana implementasi kebijakan dapat mengurangi kesenjangan dan mewujudkan pemerataan akses pendidikan. Berdasarkan uraian tersebut, kerangka pikir dapat divisualisasikan sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

2.4 Hipotesis

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

1. H_1 = Implementasi kebijakan pendidikan (komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi) berpengaruh terhadap kesenjangan akses pendidikan di Kabupaten Pesisir Barat.

2. H_0 = Implementasi kebijakan pendidikan (komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi) tidak berpengaruh terhadap kesenjangan akses pendidikan di Kabupaten Pesisir Barat.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2020). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Ayuningtyas, I. (2021). Ketimpangan akses pendidikan di Kalimantan Timur. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 6(2), 117-129.
- Desrinelti, D., Afifah, M., Gistituati, N. (2021). Kebijakan Publik: Konsep Pelaksanaan. *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)*, 6(1), 83-88.
- Patricia, A. N., Febriani, S., & Ananda, R. (2025). Kebijakan Dan Permasalahan Akses Pendidikan Dasar. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 10(2), 551-561.
- Kristian, I. (2023). Kebijakan Publik Dan Tantangan Implementasi Di Indonesia. *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial*, 21(2), 88-98.
- Nasaruddin, H. (2023). *Implementasi kebijakan penyelenggaraan pendidikan dasar di Kabupaten Sinjai (Studi Kecamatan Pulau Sembilan)*. Disertasi, Universitas Negeri Makassar.
- Noviani, F. N. F., Klareza, Y., Fahmilia, D., & Koto, I. (2025). The Impact of Education Policy on Equity of Access to Education in Indonesia and New Zealand. *TOFEDU: The Future of Education Journal*, 4(4), 921-929.
- Nurwan, T. W. (2019). Implementasi kebijakan pendidikan inklusif di sekolah dasar. *JESS (Journal of Education on Social Science)*, 3(2), 201-212.
- Meilina, D. (2016). *Implementasi kebijakan pendidikan program Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) di SMA Negeri 1 Kasui Way Kanan*. Tesis, Universitas Lampung.
- Subarsono, A. (2016). *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Suyana, N., Dalmeri, D., Sugiharto, S., & Jupriadi, J. (2024). Kebijakan pendidikan nasional menghadapi tantangan global sebuah analisis strategis dan prioritas. *Journal of Education Research*, 5(1), 620-634.
- Widodo, J. (2021). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Media Nusa Creative.
- Wijayati, I. W., Damanik, F. H. S., & Prawirosastro, C. L. (2025). Kesenjangan Akses Pendidikan di Daerah Terpencil: Analisis Kebijakan dan Alternatif Solusi. *Journal Scientific of Mandalika (JSM)*, 6(3), 671-677.
- Winarno, B. (2012). *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS.